



merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana,

Kasus Yang disangkakan kepada oknum ASN dikabupaten Buol terkait seleksi CASN yang di gelar Polres Buol diakhir tahun 2021, dimana telah terjadi dugaan kecurangan dalam pelaksanaan seleksi CASN sejumlah 27 peserta seleksi saat itu.

Diketahui sebelumnya kasus tersebut ditangani oleh Polres Buol namun untuk memudahkan penyelidikan, kasus di serahkan penanganannya ke Polda Sulteng hingga tahap penyidikan.

Tertuang dalam surat perintah penahanan tersebut memuat sejumlah pasal yakni:

1.Pasal 7 ayat (1) huruf d.Pasal 11. Pasal 20 ayat (1) Pasal 21 ayat (1) dan (3) pasal 22 ayat (1) huruf a pasal 24 KUHP.

2.Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.Perkap Nomor 06 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

4.Laporan Polisi Nomor:LP/338/XII/2021/Sulteng/Res Buol.tanggal 15 Desember 2021

5.Surat perintah penyidikan Nomor : SP- Sidik/22/I/2022 Ditreskrimsus tanggal 17 Januari 2022.

Dikutip dari pemberitaan oleh media Nasional KORAN-JAKARTA tanggal 29 Oktober 2021- Setelah dilakukan forensik oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di mana seluruh PC yang digunakan dalam tes Seleksi CPNS di Kabupaten Buol dicek dan ditemukan fakta adanya dugaan kecurangan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol (M) inisial diduga terlibat dalam kecurangan tes SKD CPNS.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (29/10) lalu.

Menteri Tjahjo, lantas memaparkan kronologi pengungkapan dugaan kecurangan tes SKD CPNS di Kabupaten Buol. Kata dia, pelaksanaan SKD CPNS di titik lokasi (tilok) mandiri Kabupaten Buol berlangsung pada 14 sampai dengan 19 September 2021.

Tes SKD ini dilaksanakan di Aula BKPSDM Buol.Tim Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga telah bertugas melakukan pengecekan terhadap seluruh PC yang akan digunakan sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2021.

" Laporan dugaan kecurangan pertama kali dibuat oleh Tim BKN pada 17 September 2021 setelah melihat pengerjaan SKD yang tidak wajar dan laporan di media sosial," kata Tjahjo.(Rahmat)